

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Salah satu permasalahan global yang dialami hampir oleh seluruh negara di dunia pada awal tahun 2020 adalah kemunculan pandemi COVID-19. Penyakit yang pertama kali terdeteksi pada Desember 2019 di Wuhan, China ini disebabkan oleh keberadaan *coronavirus* yang berpotensi menimbulkan infeksi saluran pernafasan. Infeksi ini beragam mulai dari yang ringan seperti batuk pilek, hingga infeksi serius yang meliputi *Middle East Respiratory Syndrome (MERS)* dan *Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)*.<sup>i</sup> Walaupun tidak lama pasca penemuan virus ini pemerintah China langsung melakukan *lockdown* kota Wuhan untuk mencegah virus ini menyebar ke wilayah yang lebih luas, akan tetapi virus ini telah terlanjur menyebar ke banyak wilayah. Dalam beberapa bulan terakhir, virus yang dapat menyebar lewat percikan dari hidung atau mulut yang keluar saat orang yang terinfeksi COVID-19 batuk, bersin atau berbicara<sup>ii</sup> ini sudah menjadi pandemi baru bagi dunia.

Berdasarkan data yang diperoleh dari WHO hingga tanggal 11 Juni 2020, pandemi COVID-19 telah mencapai angka 7.145.539 kasus dengan jumlah kematian mencapai 408.025 kasus. Angka tersebut menyebar di berbagai negara di seluruh dunia dengan jumlah kasus tertinggi berada di Amerika Serikat yang mencapai angka 2,04 juta kasus. Disamping itu, COVID-19 juga mewabah di banyak negara di kawasan Asia seperti Indonesia, Korea Selatan,

Singapura, India, Filipina, Malaysia, dan sekitarnya. Walaupun angka kasus positif COVID-19 cenderung beragam di berbagai wilayah dunia, virus ini telah menjadi suatu pandemi besar yang merugikan hampir seluruh negara di dunia baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini semakin diperparah dengan peralihan pusat penyebaran COVID-19 dari China menjadi Iran, Eropa dan Amerika Serikat (AS).<sup>iii</sup>

Secara umum mewabahnya COVID-19 ke banyak negara di dunia telah menyebabkan banyak kerugian baik dari segi ekonomi maupun sosial. Pembatasan aktivitas dan mobilitas masyarakat telah menurunkan angka aktivitas ekonomi di berbagai belahan dunia. Berdasarkan data *The Economic Intelligence Unit (EIU)*, pandemi global ini telah menurunkan angka pertumbuhan ekonomi dunia sebesar 2,2 persen dan hampir menyebabkan seluruh negara anggota G20 mengalami resesi.<sup>iv</sup> Disamping itu, secara spesifik COVID-19 juga telah menyebabkan banyak pemutusan hubungan kerja dan meningkatkan angka pengangguran di kawasan Asia. Menurunnya jumlah pendapatan dan meningkatnya kebutuhan medis telah melemahkan kemampuan ekonomi negara. Selain itu tingginya kasus positif dan tunjangan yang harus diberikan negara demi menjaga stabilitas sosial warganya juga menjadi masalah baru bagi negara-negara di kawasan Asia.<sup>v</sup>

Penyebaran COVID-19 yang tergolong masif dan kemunculannya yang mendadak juga telah memutus banyak sumber pendapatan, baik individu, kolektif, maupun negara, akibat pembatasan aktivitas dalam rangka memutus

mata rantai penyebaran. Dan dari segi sosial, banyak terjadi penurunan kualitas hidup akibat COVID-19. Pemberhentian kegiatan sekolah, hiburan, dan massa telah membawa banyak dampak negatif bagi hampir seluruh pihak. Bahkan disinyalir keberadaan COVID-19 juga berpotensi memicu lahirnya celah ketimpangan sosial yang semakin besar. Hal ini hanyalah dampak secara umum yang dirasakan hampir semua orang di wilayah yang terdampak COVID-19, masih banyak dampak lebih spesifik yang menyerang dan menurunkan daya hidup banyak manusia di dunia.

Sebagai salah satu negara yang berada di kawasan Asia, negara Filipina tidak luput dari penyebaran wabah COVID-19. Sejak ditemukannya kasus pertama COVID-19 pada 30 Januari 2020 pada seorang wanita berusia 38 tahun berkewarganegaraan China, Pemerintah Filipina mulai mengambil langkah awal dalam mencegah penyebaran COVID-19. Upaya ini semakin ditingkatkan setelah penularan pertama COVID-19 kepada warga lokal terjadi pada 7 Maret 2020.<sup>vi</sup> Walaupun begitu, hingga tanggal 11 Juni 2020 tercatat Filipina telah memiliki 23,732 kasus positif COVID-19 dengan angka kematian mencapai 1,027 kasus.<sup>vii</sup> Dan tidak menutup kemungkinan angka ini akan mengalami kenaikan seiring dengan belum ditemukannya vaksin untuk mengatasi virus COVID-19.

Sama seperti kebanyakan negara di dunia, keberadaan COVID-19 juga membawa banyak dampak negatif bagi Filipina. Dalam segi ekonomi, pandemi ini telah menurunkan target pertumbuhan ekonomi Filipina yang semula berada di antara 6,5 persen hingga 7,5 persen menjadi hanya 4,3 persen.<sup>viii</sup> Selain itu

pandemi ini juga menurunkan produktivitas negara Filipina di bidang transportasi, *tourism*, ekspor, dan konsumsi harian.<sup>ix</sup> Penurunan remitansi akibat pemutusan hubungan kerja juga berpengaruh terhadap berkurangnya pendapatan Pemerintah Filipina. Sementara di bidang sosial, Pemerintah Filipina menerapkan protokol ketat bagi warga negaranya untuk membatasi penyebaran COVID-19, bahkan hingga ke level *lockdown* di beberapa wilayah. Sekolah, kantor dan mayoritas fasilitas umum juga ditutup sementara untuk mencegah munculnya kerumunan warga, hanya layanan kesehatan yang tetap diperbolehkan beroperasi di tengah pandemi COVID-19. Protokol kesehatan ketat juga diberlakukan oleh Pemerintah Filipina di seluruh wilayahnya dengan pemberian hukuman berat bagi setiap pelanggarnya.

Besarnya pengaruh dan dampak negatif dari penyebaran COVID-19 tentunya menuntut tindakan segera dari pihak yang berdaulat untuk mencari jalan keluar tercepat. Dalam hal ini, pemerintahan negara beserta aktor internasional lainnya diharapkan dapat segera mencari solusi dan mengatasi dampak yang timbul. Tindakan cepat ini dibutuhkan akibat dampak COVID-19 yang bisa menjadi semakin parah jika dibiarkan. Tindakan penanganan juga diperlukan akibat belum adanya vaksin yang dapat memberantas COVID-19. Akan tetapi sulit bagi suatu pemerintahan untuk berdiri sendiri melawan sebuah pandemi global. Dibutuhkan kerja sama dan dukungan dari pihak negara dan aktor internasional untuk dapat saling bahu-membahu mengatasi masalah yang dianggap meresahkan banyak pihak ini.

Pada konteks penanganan dampak negatif pandemi COVID-19 di dunia saat ini, negosiasi yang dilakukan aktor-aktor internasional dapat berujung ke berbagai bentuk kerja sama. Salah satunya adalah pemberian bantuan internasional (*international aid*). Dengan landasan dasar nilai-nilai kemanusiaan, pemberian *international aid* dari suatu pemerintahan/lembaga/aktor internasional diharapkan dapat mengurangi beban negara tujuan. Walaupun pada penerapannya pemberian *international aid* tidak semata-mata hanya berdasarkan alasan kemanusiaan, kadang kala pemberian *international aid* dianggap turut membawa kepentingan politik dari negara pendonor.

Sebagai salah satu negara aliansi Filipina, AS juga turut mendonorkan *international aid* dalam rangka penanggulangan dampak negatif COVID-19 di Filipina. Walaupun diberikan dengan alasan kemanusiaan, pada nyatanya *international aid* dari AS juga memberikan pengaruh bagi kebijakan politik Filipina. Secara spesifik *international aid* AS telah membawa perubahan bagi keberlangsungan *Visiting Forces Agreement* (VFA) antara Filipina dengan Amerika Serikat di masa pandemi COVID-19. VFA yang semula akan dibatalkan secara sepihak oleh pihak Pemerintah Filipina beralih menjadi memasuki masa penangguhan pasca AS memberikan *international aid*-nya. Alasan-alasan yang melatarbelakangi keputusan Pemerintah Filipina dalam mengubah kebijakannya terkait VFA inilah yang kemudian melatarbelakangi tulisan ini.

## B. Batasan Masalah dan Rumusan Masalah

### 1) Batasan Masalah

Batasan masalah yang akan digunakan penulis dalam menganalisa tulisan yang berjudul “Pengaruh *International Aid* Amerika Serikat Terhadap *Visiting Forces Agreement* Antara Filipina Dengan Amerika Serikat di Masa Pandemi COVID-19” ini mengacu kepada batasan waktu penelitian. Secara spesifik penelitian ini akan menganalisis relasi antara Pemerintah Filipina dengan AS pada kurun waktu Januari 2020 hingga Januari 2021. Bulan Januari 2020 dipilih sebagai batas awal penelitian untuk menyesuaikan terdeteksinya kasus pertama COVID-19 di Filipina. Sementara Januari 2021 dipilih sebagai batas akhir penelitian dikarenakan perpanjangan pembatalan VFA berlaku hingga Januari 2021.

### 2) Rumusan Masalah

Secara garis besar tulisan ini berusaha menganalisa dan menjawab rumusan masalah yang berupa:

Mengapa Filipina melakukan penundaan perubahan kebijakan VFA terhadap Amerika Serikat selama pandemi COVID-19?

### C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

#### 1) Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, tulisan ini bertujuan untuk:

- a. Menjabarkan *international aid* yang diterima Pemerintah Filipina dari pihak Amerika Serikat selama masa pandemi COVID-19.
- b. Memberikan gambaran mengenai pengaruh *international aid* dari Amerika Serikat terhadap keputusan Pemerintah Filipina.

#### 2) Manfaat Penelitian

Berangkat dari tujuan yang berusaha dicapai oleh tulisan ini, besar harapannya tulisan ini dapat memberikan manfaat berupa:

- a. Pengetahuan baru dan gambaran bagi pembaca mengenai pengaruh *international aid* terhadap keputusan politik suatu pemerintahan.
- b. Memberikan informasi tambahan mengenai *international aid* yang diberikan Amerika Serikat terhadap Pemerintah Filipina selama masa pandemi COVID-19.

### D. Tinjauan Pustaka

- 1) Lewicki, R. J., Barry, B., & Saunders, D. M. (2016). *Essentials of Negotiation*, 1 – 27.

Pada buku *Essentials of Negotiation*, Lewicki, R. J., Barry, B., dan Saunders, D. M., berusaha memberikan gambaran mengenai apa yang dimaksud dengan proses negosiasi beserta kedekatannya dengan kehidupan sehari-hari. Menurut Lewicki dkk, negosiasi merupakan suatu hal yang kerap terjadi dalam hidup manusia dan penerapannya tidak hanya dilakukan oleh para negosiator profesional saja. Dalam buku ini dikatakan negosiasi dapat terjadi dalam berbagai kesempatan, seperti misalnya ketika diperlukan kesepakatan untuk membagi sejumlah sumber daya yang terbatas, ketika ingin melakukan sesuatu yang memerlukan kerja sama, atau untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau sengketa antar beberapa belah pihak. Secara garis besar negosiasi diperlukan manusia untuk menyelesaikan permasalahan hidup sehari-hari.

Negosiasi dalam buku ini didefinisikan secara sederhana sebagai “*a form of decision makin in which two or more parties talk with one another in an effort to resolve their opposing interests.*”<sup>x</sup> Disamping itu, buku ini juga berusaha membedakan antara negosiasi dengan tawar-menawar (*bargaining*). Jika dalam proses tawar menawar akan selalu ada pihak yang kalah dan menang, dalam proses negosiasi semua pihak yang terlibat memiliki kemungkinan untuk menang semua. Maka dari itu esensi dari proses negosiasi tidak hanya terjadi ketika proses “*give and take*” kepentingan, tetapi juga proses sebelum peristiwa negosiasi itu



terjadi. Sehingga menjadi penting untuk turut serta mempertimbangkan faktor latar belakang dan dampak di masa yang akan datang apabila negosiasi tersebut terjadi.

Negosiasi sendiri memiliki karakteristik khusus yang harus dipenuhi untuk dapat kemudian menentukan suatu tindakan sebagai tindakan negosiasi. Sebuah negosiasi harus melibatkan setidaknya dua pihak, yang dapat berupa individu, kelompok, maupun negara. Selain itu, negosiasi dapat terjadi apabila ada konflik kepentingan atau kebutuhan yang harus diselesaikan dan dicari jalan keluarnya. Disamping itu dalam suatu negosiasi akan selalu ada pilihan. Manusia cenderung melakukan kegiatan negosiasi karena merasa ada pilihan lain yang lebih baik yang bisa didapat apabila negosiasi tersebut terlaksana. Karakteristik lainnya dari negosiasi adalah “*give and take*”. Ketika melakukan negosiasi semua pihak yang terlibat harus sudah memiliki kesadaran untuk mau memberi jika ingin menerima apa yang menjadi tujuan dari negosiasi tersebut. Hal ini pun berkaitan dengan karakteristik lainnya dari negosiasi yaitu “*trust*”. Dimana semua pihak yang terlibat harus dapat saling mempercayai satu sama lain sebelum kemudian melangkah lebih jauh ke dalam proses negosiasi.

Disamping itu negosiasi juga tidak harus selalu dilakukan ketika menghadapi suatu konflik. Beberapa kondisi yang menurut buku ini tidak memerlukan negosiasi sebagai media untuk mencapai jalan keluar

antara lain ketika negosiasi hanya akan menghasilkan kekalahan telak atau memberikan kerugian dalam skala besar. Negosiasi juga tidak diperlukan jika lawan negosiasi melakukan tindakan curang dan tidak mengindahkan etika dalam bernegosiasi. Selain itu dalam negosiasi juga diperlukan adanya rasa kepercayaan antar kedua belah pihak, apabila tidak ada kepercayaan maka negosiasi tidak dapat berlanjut. Dan terakhir, buku ini menekankan untuk jangan melakukan negosiasi apabila tidak ada persiapan. Sebagai salah satu esensi penting dari kegiatan negosiasi, persiapan yang matang dapat menjadi senjata ampuh ketika negosiasi itu terjadi. Namun jika pihak yang akan bernegosiasi tidak memiliki persiapan, besar kemungkinan negosiasi hanya akan menghasilkan kekalahan bagi pihak tersebut.

Pada saat negosiasi telah terjadi akan muncul ketergantungan satu sama lain antar pihak yang terlibat dalam kegiatan negosiasi tersebut. Ketergantungan ini dapat berakhir ketika tenggat waktu kerja sama yang dinegosiasikan telah tercapai, atau bahkan bisa saja berlarut-larut untuk waktu yang lama. Maka dari itu buku ini juga menggarisbawahi pentingnya memahami hasil akhir dari suatu negosiasi, dimana negosiasi memungkinkan terjadinya keterikatan antar pihak-pihak yang terlibat. Dan tidak hanya membahas mengenai negosiasi, buku ini juga berusaha membahas secara singkat pengertian dari konflik yang kerap kali menjadi akar dari terjadinya negosiasi tersebut. Secara definitif konflik

dapat diartikan sebagai ketidaksepakatan atau perlawanan yang timbul akibat adanya kepentingan atau kebutuhan yang perlu dipenuhi. Tingkatan dari konflik pun dapat beragam mulai dari dalam individu, antar individu, dalam kelompok, maupun antar kelompok. Hal ini juga menunjukkan kadang kala suatu konflik dapat berujung kepada banyak peristiwa yang kemudian berakhir ke arah negosiasi.

Perbedaan antara buku karya Lewicki, R. J., Barry, B., dan Saunders, D. M. dengan penelitian ini terletak pada segi pembahasan. Jika dalam buku ini membahas teori negosiasi beserta penerapan dan tahap-tahap penggunaannya, penelitian ini justru membahas realita negosiasi dalam studi kasus antara Amerika Serikat dengan Filipina. Konsep negosiasi yang dikemukakan dalam buku ini digunakan sebagai acuan untuk menentukan tindakan dari kedua belah pihak dalam menentukan sikap demi mencapai suatu kepentingan. Sehingga dapat dikatakan buku ini merupakan pedoman dan arahan bagi penelitian ini untuk kemudian menganalisis studi kasus yang menjadi objek penelitian utama.

**2) Kanbur, Ravi. 2003. *The Economics of International Aid*. New York: Cornell University, 1 – 32.**

Pada jurnalnya, Ravi Kanbur berusaha untuk membahas sejarah dari *international aid* secara keseluruhan. Dengan mengutip dari definisi

ahli, Kanbur menggambarkan *international aid* (atau dalam jurnal ini juga merujuk kepada “*development assistance*”) sebagai pemberian atau pinjaman yang diberikan kepada negara berkembang atau wilayah tertentu yang berada di bawah pemerintahan pusat negara pendonor dengan objektif utama meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan di wilayah target. Dan sebagai catatan penting, Kanbur menekankan bantuan internasional ini diberikan atas dasar kesadaran finansial baik dari pihak pendonor maupun penerima sehingga bantuan ini diharapkan dapat menopang pertumbuhan ekonomi di negara penerima.

Jurnal ini juga membahas munculnya bantuan modern yang mulai dikenal dunia internasional pada abad ke 19. Bantuan ini mulai muncul dari masa kolonial Inggris yang kala itu sering membantu wilayah jajahannya dengan memberikan bantuan terikat. Pembangunan dan sokongan ekonomi yang diberikan oleh kerajaan Inggris kala itu dianggap sebagai bentuk utang moral yang kemudian mengikat negara-negara yang dibantu dengan kerajaan Inggris. Keberadaan bantuan modern juga semakin dikenal luas pasca perang dunia kedua dimana mulai muncul *Marshall Plan*, *World Bank* dan *International Monetary Fund*. Walaupun bantuan yang diberikan bertujuan untuk memulihkan kerusakan pasca perang dunia kedua, namun nyatanya ada unsur politik yang turut dibawa oleh bantuan tersebut.

Penerimaan terhadap bantuan dari negara asing juga mengalami evolusi sejak perang dingin. Jika sebelumnya banyak ahli yang memandang bantuan sebagai cara untuk meningkatkan ketergantungan, pasca perang dingin bantuan internasional mulai dipandang sebagai salah satu bentuk kerja sama. Negara-negara di dunia mulai banyak yang menyadari pentingnya peranan bantuan internasional dalam menopang perekonomian dan pembangunan negaranya. Walaupun semakin banyak kepentingan politik yang dibawa bantuan internasional pada era perang dingin, namun keberadaannya mulai diterima dan memainkan peran penting dalam pertumbuhan banyak negara berkembang.

Teori bantuan internasional sendiri terbagi ke dalam dua kondisi, yaitu tidak bersyarat dan bersyarat. Secara teori pada bantuan internasional yang tidak bersyarat donor akan memberikan bantuan kepada pihak penerima dengan berbagai kondisi, misalnya saja karena kondisi terpaksa. Suatu negara dapat dipaksa oleh pihak publik internasional untuk memberikan bantuan kepada negara tertentu tanpa melahirkan keterikatan. Akan tetapi pada realitanya, setiap bantuan yang diberikan akan selalu melahirkan ikatan tidak terlihat yang menyebabkan negara penerima memiliki utang terhadap negara pendonor. Sedangkan pemberian bantuan internasional bersyarat adalah pemberian bantuan dari negara pendonor kepada penerima

dengan diikuti sejumlah kesepakatan tertentu. Walaupun keduanya sama-sama membawa kepentingan politik di balik bantuannya, namun ikatan politik dari bantuan bersyarat cenderung lebih spesifik dan jelas.

Sebagai dampak atas pemberian bantuan internasional, banyak negara berkembang yang mulai dapat menopang perekonomiannya sendiri. Namun lebih banyak lagi negara berkembang yang malah jadi bergantung dengan negara pendonornya. Hal ini lah yang kemudian mendorong Kanbur menyimpulkan bantuan internasional sebagai bantuan terikat. Bentuk bantuan terikat ini berlaku kepada setiap bantuan internasional yang diberikan, baik bantuan dalam bentuk sumbangan dana, makanan, maupun infrastruktur.

Tulisan dari Kanbur yang membahas tentang bantuan internasional beserta sejarah kemunculan dan evolusinya ini merupakan bahan acuan dari penelitian ini. Penelitian ini membahas mengenai perubahan sikap Filipina terhadap Amerika Serikat pada masa pandemi COVID-19 dengan menjadikan bantuan internasional sebagai salah satu faktor utama. Dengan mengaplikasikan pengertian bantuan terikat dan prinsip bantuan tidak bersyarat yang telah dikemukakan sebelumnya oleh Kanbur, penulis berusaha menggambarkan bagaimana bantuan Amerika Serikat memainkan perannya dalam hubungan Filipina – Amerika Serikat.

- 3) Raschky, Paul A., dan Manijeh Schwindt. 2010. *“On the Channel and Type of Aid: The Case of International Disaster Assistance.”* Discussion paper 06/10 (Monash University) 1-40.

Berangkat dari mewabahnya bantuan internasional yang diberikan ke berbagai kelompok/negara selama 30 tahun terakhir, tulisan *On the Channel and Type of Aid: The Case of International Disaster Assistance* karya Raschky dan Schwindt ini berusaha memetakan bantuan internasional yang diberikan dalam rangka penanggulangan bencana. Jurnal ini mengawali tulisannya dengan menggambarkan banyaknya *scholars* yang cenderung menyamaratakan semua jenis dan dampak bantuan internasional yang diberikan. Padahal ada banyak aspek kepentingan yang menjadi faktor pendorong bagi donor untuk memberikan bantuan internasionalnya. Misalnya saja dalam kasus pemberian bantuan internasional berupa makanan, timbal balik yang diharapkan ternyata tidak selalu berkaitan dengan strategi kepentingan. Pada realitanya, faktor negara penerima donor juga mempengaruhi negara atau organisasi yang memberikan donor.

Salah satu faktor yang dapat mendorong pendonor untuk mengulurkan bantuan internasionalnya antara lain faktor kemanusiaan. Biasanya bantuan internasional akan diberikan bagi wilayah yang mengalami bencana atau memiliki konflik kemanusiaan di dalamnya. Bentuk bantuan internasional yang diberikan biasanya berupa asistensi

atau material yang dirasa dapat meringankan beban pemerintah setempat. Selain itu bantuan juga dapat diberikan dengan mempertimbangkan latar belakang sosial ekonomi dari penerima. Biasanya bantuan seperti ini lebih mengarah kepada bantuan pembangunan yang harapannya dapat mengatasi masalah sosial ekonomi di wilayah tersebut. Tidak hanya mempertimbangkan kondisi penerima saat bantuan internasional akan diberikan, beberapa donor juga mempertimbangkan kelayakan dari penerima bantuan. Kelayakan ini dipertimbangkan untuk memastikan bantuan yang diberikan dapat berdaya guna sebisa mungkin. Kemungkinan terjadinya korupsi dan kesalahan dalam pengalokasian bantuan yang diberikan kerap kali menjadi alasan bagi negara donor untuk mencabut atau menghentikan bantuan internasional yang diberikan. Kadang kala, pendonor juga kerap mempertimbangkan biaya tambahan yang harus dikorbankan diluar bantuan yang diberikan. Biaya ini bisa berupa biaya pengiriman atau pun biaya penyaluran bantuan, yang bisa saja membutuhkan pengorbanan yang tidak sedikit. Faktor lainnya yang kerap kali dianggap sebagai faktor utama bagi seorang donor dalam memberikan bantuan internasional adalah kepentingan politik. Adanya kepentingan yang perlu dicapai kerap kali mendorong donor untuk merealisasikan penyaluran bantuan internasionalnya.



Secara kesimpulan, jurnal ini menyorot perilaku donor bantuan internasional yang kerap kali memasukan banyak kepentingan dalam memberikan suatu bantuan. Sehingga saat ini bantuan internasional tidak lagi bisa dikatakan sebagai bantuan kemanusiaan. Walaupun begitu jurnal ini tidak mempermasalahkan kepentingan dari tiap pendonor karena jika meninjau realita politik internasional, akan selalu ada kepentingan yang menjadi prioritas setiap aktor-aktor politiknya.

Jurnal yang membahas mengenai perilaku dari pendonor bantuan internasional beserta pertimbangannya dalam memberikan bantuan internasional ini berguna sebagai pedoman dalam penelitian ini. Dengan berkaca kepada berbagai pertimbangan yang ada, penulis berusaha menganalisis kondisi Filipina selama masa pandemi COVID-19 yang kemudian mendorong Pemerintah Amerika Serikat untuk memberikan bantuan internasionalnya. Secara spesifik penulis akan lebih berfokus kepada kondisi dan situasi dari Filipina sebagai negara penerima.

- 4) **Velasco, Mark Anthony M. 2015. “The Visiting Forces Agreement (VFA) in the Philippines: Insights on Issues of Sovereignty, Security and Foreign.” Asia Pacific Journal of Multidisciplinary Research (Asia Pacific Journal of Multidisciplinary Research) 3: 82-89.**

Jurnal yang diterbitkan pada November 2015 tulisan Mark Anthony M. Velasco ini berusaha membandingkan kerja sama militer yang terjalin antara Pemerintah Filipina dan Amerika Serikat (AS) dengan Pemerintah Filipina dan Australia. Melalui analisisnya jurnal ini membandingkan definisi, latar belakang, dan permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan perjanjian militer kedua negara, baik dalam bentuk *Visiting Forces Agreement (VFA)* dengan AS maupun dalam bentuk *Status of the Visiting Forces Agreement (SOVFA)* dengan Australia. Dengan menggunakan perspektif Filipina, Velasco berusaha mendefinisikan persamaan dan perbedaan dari VFA dengan SOVFA. Pendefinisian ini mengacu kepada isi-isi dari perjanjian resmi kedua kerja sama tersebut.

*Visiting Forces Agreement (VFA)* merupakan tali kerjasama antara Pemerintah Filipina dengan AS dalam rangka memperkuat pertahanan kedua belah negara. Berdasarkan sejarah kerjasama yang terjalin antara Filipina dengan AS telah dimulai sejak tahun 1946. Pasca memperoleh kemerdekaannya dari pihak AS, Pemerintah Filipina masih bergantung kepada AS di bidang ekonomi, politik, perdagangan, dan keamanan. Dalam bidang militer, kerjasama antara Pemerintah Filipina dengan AS berhasil menghasilkan *Military Bases Agreement (MBA)* yang kemudian melahirkan *Joint U.S. Military Advisory group (JUSMAG)*. Walaupun begitu kerjasama ini tidak berlangsung lama karena pihak Pemerintah

Filipina mulai merasa bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Baru pada tahun 1999 Pemerintah Filipina mulai merasakan pentingnya kehadiran pihak militer AS di negaranya. Ketika terancam oleh pihak China yang kala itu ingin menguasai wilayah Laut Cina Selatan, Pemerintah Filipina memutuskan untuk bekerja sama kembali dengan AS di bidang pertahanan militer. Pasca kejadian 11 September 2001 pihak AS semakin memperkuat kerjasamanya militernya, khususnya dengan Filipina sebagai aliansinya di kawasan Asia Tenggara.

Akan tetapi keberadaan VFA tidak sepenuhnya mendapat dukungan dari pihak Pemerintah Filipina. Ada juga pihak-pihak yang merasa keberadaan VFA hanya menguntungkan Pemerintah AS dan merugikan Filipina. Franciso Nemenzo, seorang ilmuwan politik, pendidik, dan aktivis Filipina, berpendapat penandatanganan VFA tidak sesuai dengan konstitusi Filipina.<sup>xi</sup> Menurut Nemenzo VFA memberikan ruang kewenangan bagi AS untuk keluar masuk Filipina dan secara tidak langsung telah merenggut kebebasan Filipina sebagai suatu negara merdeka. Walaupun banyak mendapat kritikan dan tentangan, pada realitanya VFA tetap dijalankan dan direalisasikan oleh pihak Pemerintah Filipina kala itu.

Meskipun masih terlibat dalam kerjasama militer dengan pihak AS, Pemerintah Filipina memutuskan untuk menjalin kerjasama militer dengan Australia yang dikenal dengan *Status of Visiting Forces*

*Agreement (SOVFA)* pada 31 Mei 2007. Hubungan antara Filipina dan Australia menurut sejarah telah terjalin sejak awal abad ke 19, ketika para misionaris Australia menyebarkan agama Kristen di Filipina. Akan tetapi hubungan kedua pihak tersebut tidak terbukukan lagi dalam sejarah hingga pecahnya perang dunia kedua. Pada era perang dunia kedua, Filipina dan Australia bersama dengan AS bekerja sama dalam melawan Jepang. Ketika Filipina pertama kali memperoleh kemerdekaannya, Australia menjadi salah satu negara pertama yang mengakui kedaulatan Filipina dengan menjalin hubungan diplomat dan membuka kedutaan besar di kedua negara. Hubungan keduanya semakin erat ketika Filipina memutuskan untuk keluar dari MBA dengan AS.

Secara legal, definisi dan visi misi dari VFA serta SOVFA memiliki banyak persamaan. Keduanya merupakan kerangka legal untuk kerjasama militer yang bertujuan untuk memperkuat kedua belah pihak. Sebagai perjanjian internasional, proses peratifikasian kedua kerjasama ini membutuhkan persetujuan dari pihak senat Filipina sebagai bentuk perwakilan rakyat. Walaupun begitu, keduanya tetap memiliki perbedaan yang signifikan. Misalnya saja di SOFVA, permasalahan lingkungan dan urusan kematian juga menjadi salah satu topik utama yang harus dibahas secara rinci. Selain itu SOFVA juga melibatkan kedua belah negara dalam menentukan jumlah personil militer yang boleh memasuki wilayah otoritas negara lainnya, sementara VFA memberikan

kebebasan bagi pihak AS untuk menentukan jumlah personil militernya di Filipina. Hal ini juga berlaku bagi kendaraan militer dan proses peradilan ketika terjadi tindak pidana.

Secara keseluruhan dapat dilihat jurnal ini berusaha menjabarkan perbedaan antara VFA dengan SOFVA. Dapat disimpulkan keduanya sama-sama dapat meningkatkan keamanan Filipina sebagai suatu negara. Akan tetapi VFA lebih berpotensi mengganggu kedaulatan dan kewenangan Pemerintah Filipina sebagai pemilik otoritas utama. Berbeda dengan jurnal yang berfokus membandingkan VFA dengan SOFVA, tulisan ini lebih membahas VFA sebagai salah satu kerja sama militer antara AS dengan Pemerintah Filipina. Dengan mengacu kepada definisi dan penjabaran dari Velasco, penulis berusaha menjelaskan posisi VFA dari segi realita penerapannya.

- 5) Heydarian, Richard Javad. 2017. "Evolving Philippines-U.S.-China Strategic Triangle: International and Domestic Drivers." *Asian Politics & Policy* 9 (4): 564-582.

Jurnal yang ditulis oleh Richard Javad Heydarian pada tahun 2017 ini secara garis besar membahas mengenai hubungan segitiga antara Filipina – Amerika Serikat – China. Hubungan ketiga negara ini digambarkan sebagai bentuk nyata dari *balance of power*, dimana Filipina menempati posisi pusat diantara persaingan kedua negara

adidaya tersebut. Pemerintahan Filipina yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Benigno Aquino III (2010 – 2016) cenderung berhaluan ke arah Amerika Serikat (AS). Akan tetapi haluan negara tersebut berubah menjadi ke arah China ketika kursi pemerintahan berganti ke tangan Rodrigo Duterte. Jurnal ini berusaha mengkaji perpindahan haluan dan dampaknya bagi pemerintah Filipina serta kedua negara adidaya tersebut.

Saat memasuki era “*post American-world*”, keadaan di dunia mulai mengalami perubahan. Fokus pembangunan tidak lagi hanya mengarah kepada Eropa dan Amerika Utara. Negara-negara di Asia mulai mendapatkan tempatnya dalam panggung pergaulan internasional. Filipina yang merupakan salah satu negara di kawasan Asia juga mulai mendapatkan atensi dunia internasional. Lewat ketergantungan Benigno Aquino III, Pemerintahan Filipina kala itu digambarkan sangat dekat dengan AS sebagai aliansi utamanya. Namun hubungan ini tidak bertahan lama karena penerusnya, Rodrigo Duterte cenderung memilih berpindah haluan ke arah China. Walaupun Filipina dan China masih terlibat dalam sengketa wilayah di Laut Cina Selatan, namun nyatanya hal ini tidak mengurungkan niat Duterte untuk menjalin kerjasama. Akan tetapi satu hal yang dapat ditandai dari langkah politik kedua kepala negara Filipina tersebut, keduanya sama-sama tidak

memiliki proyeksi hubungan jangka panjang dalam menjalin relasi dengan negara aliansinya masing-masing.

Sejak zaman pemerintahan Presiden Ferdinand Marcos, haluan politik Filipina kerap kali mengalami perubahan. Setiap kali terjadi pemilihan presiden baru di Filipina, masing-masing presiden selalu memiliki pandangan politiknya tersendiri. Sehingga dapat dikatakan arah haluan politik Filipina cenderung bertolak ukur pada penilaian dari presiden yang saat itu sedang menjabat. Perubahan haluan yang bergonta-ganti ini dianggap sebagai dampak dari persaingan kekuatan antara kedua negara adidaya tersebut. Filipina sebagai negara kecil yang terjebak diantara keduanya dianggap dapat memanfaatkan potensi yang dianggap paling baik untuk pertumbuhan negaranya. Keberanian Pemerintahan Filipina untuk menjalin relasi dengan keduanya sekaligus dan memprioritaskan yang paling menguntungkan menyebabkan kedua negara tersebut tidak dapat menyepelekan keberadaan Filipina. Demi mengamankan posisinya sebagai aliansi dari Filipinya, baik China maupun AS, telah menjalin beberapa kerja sama dengan pihak Filipina.

Salah satu presiden Filipina yang cukup mengejutkan publik dengan keputusannya adalah Presiden Rodrigo Duterte. Duterte yang sejak awal masa kepemimpinannya telah menunjukkan kedekatannya dengan pihak China secara tidak langsung telah memberikan peringatan keras bagi AS. Peringatan ini diberikan sebagai reaksi atas kecaman yang

dilayangkan pihak AS terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Filipina akibat program *war on drugs* dari Duterte. Walaupun begitu, Duterte juga tetap menjaga jarak aman dari pihak China. Selain untuk memberikan rasa khawatir bagi AS, jarak aman ini juga diperlukan untuk mempertahankan wilayah Filipina di Laut Cina Selatan. Sehingga secara keseluruhan dapat dikatakan hubungan antara Filipina dengan AS maupun China tidak selamanya berjalan mulus, akan tetapi posisi Filipina bagi kedua negara tersebut cenderung penting.

Berdasarkan uraian tersebut dapat digambarkan bagaimana hubungan antara Filipina dengan AS dan China yang cenderung berpindah-pindah satu sama lain. Perpindahan ini dianggap wajar karena Pemerintah Filipina berusaha menjalin relasi yang dianggap paling menguntungkan bagi pihaknya. Perbedaan dari jurnal karya Richard Javad Heydarian dengan tulisan ini terletak pada fokus pembahasannya. Apabila jurnal ini membahas hubungan tiga negara antara Filipina, AS, dan China, tulisan kali ini hanya berfokus pada relasi Filipina dengan AS. Gambaran tentang relasi yang telah terjalin antara Filipina dengan AS akan digunakan sebagai gambaran tambahan bagi tulisan ini.

- 6) **Rahmat, Hayatul Khairul, Rizkia Mutiara Ramadhani, Nurbaiti Ma'rufah, Fitri Andrianti Indah Gustaman, Siswo Hadi Sumantri, dan Agus Adriyanto. 2020. "BANTUAN CHINA BERUPA ALAT UJI CEPAT COVID-19**



**KEPADA FILIPINA: PERSPEKTIF DIPLOMACY AND INTERNATIONAL LOBBYING THEORY.” Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial 30: 19-27.**

Dengan menggunakan metode studi pustaka, jurnal yang dipublikasi pada Juni 2020 ini bertujuan untuk menjabarkan tujuan yang ingin dicapai China melalui pemberian asistensi kepada Filipina dan reaksi Filipina terhadap asistensi tersebut. Dengan pendekatan deskriptif dan studi literatur tulisan ini menggunakan teori diplomasi dan lobi internasional untuk menjelaskan bagaimana asistensi yang diberikan China berfungsi sebagai alat Pemerintah China dalam mempengaruhi kebijakan Filipina terkait konflik maritim antar kedua belah negara.

Salah satu permasalahan besar yang dihadapi Pemerintah Filipina di awal tahun 2020 adalah mewabahnya COVID-19 di negaranya. Akibat dari mewabahnya pandemi ini perekonomian Filipina mengalami penurunan dan pemerintah yang berdaulat menghadapi berbagai krisis ekonomi. Sebagai salah satu negara yang memiliki hubungan diplomasi dengan Filipina, Pemerintah China tidak berpangku tangan menghadapi pandemi COVID-19 ini. Melalui Duta Besar China untuk Filipina, Huang Xilian, Pemerintah China mengatakan akan membantu menangani penyebaran COVID-19 dan mengirimkan bantuan kit uji COVID-19 ke Filipina. Walaupun bantuan yang berusaha ditawarkan Pemerintah China terlihat seperti bantuan kemanusiaan, akan tetapi ada potensi

kepentingan politik di balik pemberiannya. Hubungan antara China dengan Filipina yang kurang baik akibat sengketa kepemilikan Laut Cina Selatan disinyalir menjadi alasan bagi Pemerintah China untuk memberikan bantuan bagi Pemerintah Filipina. Hal inilah yang kemudian berusaha dijelaskan dalam jurnal ini.

Pemberian bantuan berupa 2000 alat uji cepat untuk virus corona oleh Pemerintah China untuk Pemerintah Filipina dijelaskan sebagai bentuk diplomasi dan lobi internasional. Pemberian bantuan yang berdalih bantuan kemanusiaan ini dianggap sebagai upaya Pemerintah China untuk melunakan Pemerintah Filipina dalam sengketa Laut Cina Selatan. Walaupun menurut Mahkamah Internasional klaim yang diajukan Pemerintah China tidak valid dan perebutan wilayah *nine dash line* telah dimenangkan oleh Pemerintah Filipina berdasarkan keputusan Mahkamah Arbitrase, akan tetapi Pemerintah China tetap berusaha memperjuangkan kepentingannya. Dengan bertindak layaknya seorang kakak yang membantu adiknya di tengah kesulitan, Pemerintah China berusaha membangun citra yang baik di mata Pemerintah Filipina.

Sebagai reaksi atas bantuan dari Pemerintah China, Pemerintah Filipina disarankan untuk tetap waspada. Walaupun kedekatan antara Presiden Filipina yang sedang menjabat saat ini, yaitu Presiden Rodrigo Duterte, dengan Pemerintah China tidak dapat ditampik lagi, namun hubungan tersebut harus tetap mendapat perhatian. Kedekatan antara

Filipina dengan China disarankan untuk tidak lebih dari sekedar kepentingan ekonomi saja. Hal ini harus menjadi perhatian khusus karena sebelumnya Presiden Duterte telah menyatakan keinginannya untuk berdiri diatas kakinya sendiri, dan tidak berada di bawah bayang-bayang Amerika Serikat maupun China.

Persamaan antara jurnal yang ditulis oleh Hayatul Khairul Rahmat, dkk dengan skripsi ini terletak pada fungsi bantuan internasional di masa pandemi COVID-19. Walaupun bantuan yang diberikan merupakan bentuk bantuan kemanusiaan, akan tetapi kedua tulisan ini sama-sama membahas kepentingan politik yang dibawa oleh bantuan tersebut dan dampaknya bagi kebijakan Pemerintah Filipina. Berbeda dengan jurnal yang membahas bantuan dari pihak China, skripsi ini membahas bantuan yang diberikan pihak Amerika Serikat. Dan disaat jurnal ini membahas mengenai keterkaitan bantuan China terhadap sengketa Laut Cina Selatan, skripsi ini membahas keterkaitan bantuan Amerika Serikat terhadap *Visiting Forces Agreement* (VFA) antara Filipina dengan Amerika Serikat.

## **E. Kerangka Konseptual**

### **1) *International Aid***

Dalam relasi dunia internasional, selalu terjadi hubungan timbal balik antar aktornya. Salah satu bentuk hubungan timbal balik yang kerap terjadi di

dunia internasional, terutama dalam tingkatan negara adalah pemberian *international aid* (bantuan internasional). Menurut kamus Britannica, *international aid* yang juga kerap disebut *foreign aid* merupakan perpindahan internasional dari modal, barang, ataupun layanan dari sebuah negara atau organisasi internasional untuk kepentingan negara penerima atau populasinya.<sup>xii</sup> Bantuan yang diberikan dapat berupa bantuan ekonomi, militer, maupun kemanusiaan. Tujuan dari bantuan ini adalah meringankan beban dari penerima, baik secara moral maupun material. Biasanya bantuan internasional menargetkan negara-negara berkembang atau menengah ke bawah, atau daerah-daerah yang sedang mengalami bencana. Bantuan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan biasanya diberikan dalam jangka waktu berkala dan berkelanjutan. Sementara bantuan yang diberikan untuk menanggulangi bencana hanya diberikan pada kesempatan-kesempatan tertentu.

Sedangkan menurut pandangan Roger C. Riddell, *foreign aid* (sebutan lain dari *international aid*) merupakan bantuan yang disediakan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk membantu meningkatkan taraf hidup mereka yang membutuhkan. Target dari bantuan ini dapat beragam meliputi mereka yang sangat miskin, mereka yang berada dalam kondisi terdesak dan tidak memiliki perlindungan lain, atau pun mereka yang berada di ambang perjuangan dalam rangka mempertahankan kelayakan hidupnya. Selain itu Riddell juga menjabarkan ada tiga tipe pendonor bantuan internasional, yaitu

pemerintah dari negara kaya, *Non-Governmental Organisations (NGOs)* dan yayasan pribadi. Walaupun bantuan diberikan untuk membantu meringankan beban dari penerima bantuan, namun fakta bahwa pengalokasian bantuan resmi juga terpengaruh oleh kepentingan politik, keamanan dan komersial dari pemerintah pendonor tidak dapat terbantahkan.<sup>xiii</sup>

Ketika berbicara mengenai bantuan internasional, Ravi Kanbur dalam jurnalnya yang berjudul "*The Economics of International Aid*" mendefinisikannya sebagai bantuan yang terikat. Dalam hal ini Kanbur menggambarkan bagaimana setiap bantuan internasional yang diberikan selalu membawa kepentingan dari negara donor. Kepentingan yang dibawa ini bisa berbentuk kepentingan politik, ekonomi, maupun militer. Sehingga bukan tidak mungkin jika ada alasan tersendiri bagi suatu negara atau organisasi untuk memberikan bantuan internasional kepada kelompok tertentu. Pandangan tersebut juga selaras dengan pendapat dari Paul A. Raschky dan Manijeh Schwindt dalam tulisan berjudul "*On the Channel and Type of Aid: The Case of International Disaster Assistance*" yang ditulis pada tahun 2010. Dalam tulisan tersebut dikatakan dalam memberi atau menerima suatu *international aids*, aktor politik akan selalu mempertimbangan kepentingan yang akan menyertainya.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, pandangan mengenai bantuan internasional menjadi pedoman dalam menganalisis studi kasus hubungan Filipina dengan Amerika Serikat selama wabah pandemi COVID-19. Dengan

menggunakan prinsip bantuan internasional sebagai bantuan terikat, penulis berusaha menggambarkan pentingnya bantuan Amerika Serikat bagi Filipina dan pengaruhnya terhadap kebijakan Pemerintah Filipina di masa pandemi COVID-19.

#### **F. Metode Penelitian**

Dalam upaya menjawab rumusan masalah dari tulisan ini, penulis akan menggunakan metode kualitatif eksplanatif sebagai metode penelitian. Pengertian dari metode kualitatif sendiri menurut Hasan Basri dapat didefinisikan sebagai suatu metode yang lebih menekankan kepada pengamatan suatu fenomena beserta maknanya sehingga kata dan kalimat yang digunakan akan sangat berdampak besar.<sup>xiv</sup> Metode kualitatif eksplanatif dipilih karena metode ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengapa sesuatu terjadi atau menjawab pertanyaan "mengapa (why)"<sup>xv</sup>, dimana hal tersebut sesuai dengan rumusan masalah yang menggunakan kata "mengapa". Sementara untuk memperoleh data, dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder sebagai sumber data utama. Data sekunder yang berupa studi pustaka akan bersumber kepada publikasi dan pemberitaan resmi baik dari pihak Filipina maupun Amerika Serikat (AS). Selain itu pernyataan-pernyataan dari tokoh-tokoh terkait dalam studi kasus ini juga akan menjadi data tambahan dalam penelitian ini.

Sebagai pelengkap data sekunder, penulis akan menggunakan berita-berita dan publikasi dari media yang terpercaya. Tujuannya adalah untuk memperkuat argumen yang telah terbangun dari hasil analisis data primer dan sekunder penulisan. Pemilihan berita dan publikasi yang akan dijadikan referensi bagi data tambahan akan dibatasi hanya pada tulisan yang relevan. Sedangkan sebagai pelengkap, penulis akan menggunakan literasi dan penelitian terdahulu sebagai bahan acuan tambahan. Semua data yang telah terkumpul kemudian akan melewati proses reduksi data untuk memilah data mana yang dirasa selaras dengan kepentingan tulisan ini. Data yang telah tereduksi kemudian akan dianalisis untuk kemudian ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah tulisan ini.

## **G. Sistematika Penulisan**

### **1) BAB I PENDAHULUAN**

Pada BAB I penulis berusaha untuk memberikan gambaran mengenai garis besar arah penulisan dan informasi-informasi terkait topik yang dikaji. Penggambaran ini terbagi ke dalam latar belakang, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, studi literatur, kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan. Bab ini berfungsi sebagai pengantar pembaca untuk dapat memahami bab-bab selanjutnya.

### **2) BAB II PENYAJIAN DATA**

Bab kedua dari penelitian ini akan menyajikan dan menjabarkan data-data yang telah diperoleh dari hasil observasi data yang ada. Secara garis besar bab kedua ini akan terbagi ke dalam empat sub-bab yang terdiri dari sub-bab mengenai *Philippines – United States Visiting Forces Agreement*, sub-bab Hubungan Bilateral Filipina dengan Amerika Serikat, sub-bab mengenai Presiden Rodrigo Duterte dan Pemerintah Filipina, serta sub-bab Bantuan Amerika Serikat.

### **3) BAB III ANALISIS DATA**

Data-data yang telah dijabarkan pada BAB II kemudian akan diolah dan dianalisis pada BAB III. Tujuan utama dari bab ini adalah berusaha menjawab rumusan masalah dari penelitian dan memberikan gambaran mengapa Pemerintah Filipina mengubah keputusan politiknya pada masa pandemi COVID-19. Dalam proses analisis ini penulis akan menggunakan studi literatur dan penelitian terdahulu sebagai materi pembandingan.

### **4) BAB IV KESIMPULAN**

Bab terakhir ini akan memberikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran yang diharapkan dapat berguna, baik bagi para pembaca maupun peneliti selanjutnya.



- 
- <sup>i</sup> World Health Organization, *Pertanyaan dan jawaban terkait Coronavirus*, 2020, <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa-for-public>, (diakses pada 11 Juni 2020)
- <sup>ii</sup> World Health Organization, *Pertanyaan dan jawaban terkait Coronavirus*, 2020, <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa-for-public>, (diakses pada 19 Juni 2020)
- <sup>iii</sup> UNDP Regional Bureau for Asia and the Pacific, (2020, April 28), *The Social and Economic Impact of COVID-19 in the Asia-Pacific Region*, 11.
- <sup>iv</sup> The Economist, (2020, Maret 26), *COVID-19 to send almost all G20 countries into a recession*, <https://www.eiu.com/n/COVID-19-to-send-almost-all-g20-countries-into-a-recession/>, (diakses pada Juni 11, 2020)
- <sup>v</sup> UNDP Regional Bureau for Asia and the Pacific, (2020, April 28), *The Social and Economic Impact of COVID-19 in the Asia-Pacific Region*, 14.
- <sup>vi</sup> World Health Organization, (2020, Mei 9), *Coronavirus disease (COVID-19) in the Philippines*, <https://www.who.int/philippines/emergencies/COVID-19-in-the-philippines>, (diakses pada Juni 11, 2020)
- <sup>vii</sup> World Health Organization, (2020, Juni 11), *Philippines*, <https://covid19.who.int/region/wpro/country/ph>, (diakses pada Juni 11, 2020)
- <sup>viii</sup> The ASEAN Secretariat, (2020, April), *Economic Impact of COVID-19 Outbreak on ASEAN*, 4
- <sup>ix</sup> National Economic and Development Authority, (2020, Maret 19), *ADDRESSING THE SOCIAL AND ECONOMIC IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC*, 7
- <sup>x</sup> Lewicki, R. J., Barry, B., & Saunders, D. M., (2016), *Essentials of Negotiation*, 3.
- <sup>xi</sup> Velasco, Mark Anthony M. 2015. "The Visiting Forces Agreement (VFA) in the Philippines: Insights on Issues of Sovereignty, Security and Foreign." *Asia Pacific Journal of Multidisciplinary Research (Asia Pacific Journal of Multidisciplinary Research)* 3: 84.
- <sup>xii</sup> Williams, Victoria. "Foreign aid". *Encyclopedia Britannica*, 5 Nov. 2020, <https://www.britannica.com/topic/foreign-aid>. Accessed 1 May 2021.
- <sup>xiii</sup> Riddell, Roger C. 2014. "Does Foreign Aid Really Work?" Background paper to keynote address to the Australasian Aid and International Development Workshop, Canberra February 2014. 1.
- <sup>xiv</sup> Basri, H. (2014, Oktober). Using qualitative research in accounting and management studies: not a new agenda. *Journal of US-China Public Administration*, 11(No. 10), 831-838. doi:10.17265/1548-6591/2014.10.003
- <sup>xv</sup> Jonathan, S. (. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 193.